



RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2024 Dinas Sosial, Renja Tahun 2024 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	38
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial.....	88
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	89
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	112
2.6 Inovasi Perangkat Daerah.....	112
2.7 Penghargaan.....	112
BAB III.....	114
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	114
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	114
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	115
BAB IV.....	118
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	118
4.1 Program dan Kegiatan.....	118
BAB V.....	148
PENUTUP.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial s.d Tahun 2022.....	16
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial s.d Triwulan I Tahun 2023.....	31
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial Triwulan I Tahun 2022 Kabupaten Temanggung.....	46
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018-2023 s.d TW II.....	52
Tabel 2.5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Tahun 2023 s.d TW II.....	56
Tabel 2.6	Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani Tahun 2023 s.d TW II.....	57
Tabel 2.7	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	60
Tabel 2.8	Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW II.....	62
Tabel 2.9	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	64
Tabel 2.10	Data Eks Migran Bermasalah Sosial Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW II.....	65
Tabel 2.11	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	67
Tabel 2.12	Data Anak terlantar Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW II.....	67
Tabel 2.13	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	69

Tabel 2.14	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2023 sampai dengan TW II.....	70
Tabel 2.15	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	71
Tabel 2.16	Data Lanjut Usia Terlantar Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 s.d TW II.....	72
Tabel 2.17	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	73
Tabel 2.18	Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2023 TW II	74
Tabel 2.19	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	75
Tabel 2.20	Rekapitulasi Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	76
Tabel 2.21	Data Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang ditangani di Luar Panti Sosial (persebaran kecamatan) Tahun 2023 S/D triwulan II	76
Tabel 2.22	Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	78
Tabel 2.23	Data Anak Panti Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan II.....	79
Tabel 2.24	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota Tahun 2018-2023 s.d TW II	80
Tabel 2.25	Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	81
Tabel 2.26	Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Tahun 2018-2023 s.d TW II	82
Tabel 2.27	Data Anggota Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 s.d Triwulan II.....	83
Tabel 2.28	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW II	85

Tabel 2.29	Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan II	85
Tabel 2.30	PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2023	86
Tabel 2.31	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	88
Tabel 2.32	Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I	89
Tabel 2.33	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	90
Tabel 2.34	Kejadian Bencana Tahun 2023 s/d TW II.....	91
Tabel 2.35	Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW II.....	95
Tabel 2.36	Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Kabupaten Temanggung	95
Tabel 2.37	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024.....	98
Tabel 2.6.1	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020 -2022.....	119
Tabel 2.7.1	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	119
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	122
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2024	126
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosal Kab. Temanggung Tahun 2024.....	132

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2017- 2022.....	53
Tabel 2.2 Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,2018 - 2022.....	54

HALAMAN VERIFIKASI

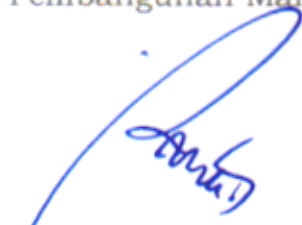
**RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL**

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : **3** Juli 2023

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia,



WAHYUNINGSIH, SHI, MM
NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

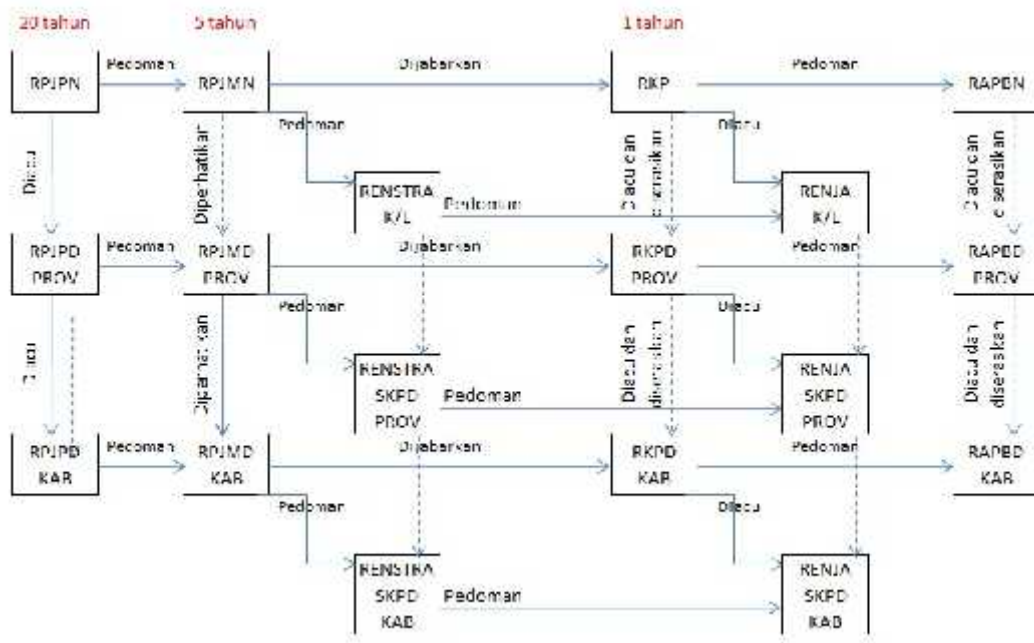
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dan perkiraan realisasi Tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan Tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Sosial;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Sosial;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Sosial;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta

pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Sosial. Namun dalam proses ini Dinas Sosial mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan

mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Tahun 2022

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II		III		IV						
	KEGIATAN			K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.552.313.256	4.846.390.766		939.756.356		1.287.977.341		1.321.620.435		1.166.659.556		4.716.013.688			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.538.696.157	3.820.773.667		740.746.890		1.073.223.777		1.086.544.882		852.377.015		3.752.892.564		98,22	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	3.538.696.157	3.820.773.667	3	740.746.890	3	1.073.223.777	3	1.086.544.882	3	852.377.015	12	3.752.892.564	100	98,22	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.949.078	70.949.078		9.232.500		16.303.500		16.161.750		22.929.400	0	64.627.150		91,09	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	4.997.506	4.997.506	3	550.000	3	2.086.000	3	1.502.000	3	858.000,00	12	4.996.000	100	99,97	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	14.986.600	14.986.600	3	1.778.000	3	3160500	3	5.619.900	3	4.421.000	12	14.979.400	100	99,95	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	6.000.000	6.000.000	3	500.500	3	1.861.000	3	2.116.850	3	1.521.400	12	5.999.750	100	100,00	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	15.111.400	15.111.400	3	2.080.000	3	440.000	3	1.625.000	3	4.655.000	12	8.800.000	100	58,23	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	29.853.572	29.853.572	3	4.324.000	3	8.756.000	3	5.298.000	3	11.474.000	12	29.852.000	100	99,99	

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				802.668.100	804.668.100		177.839.466		182.823.179		189.230.653		216.036.288	0	765.929.586		95,19
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah	Bulan	12	6.000.000	6.000.000	3	370.000	3	1.249.500,00	3	3.070.000	3	1.305.000	12	5.994.500	100	99,91
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	75.000.000	77.000.000	3	17.936.357	3	18.583.922	3	16.844.575	3	17.592.902	12	70.957.756	100	92,15
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	14.945.800	14.945.800	3	995.000	3	1.730.000	3	4.278.750	3	7.882.000	12	14.885.750	100	99,60
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 2 SS disabilitas)	Bulan	12	706.722.300	706.722.300	3	158.538.109	3	161259757	3	165.037.328	3	189.256.386	12	674.091.580	100	95,38
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 Kebersihan dan 6 Satpam)	Bulan	12			3		3		3		3	12	100			
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.999.921	149.999.921		11.937.500		15.626.885		29.683.150		75.316.853	0	132.564.388		88,38
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (suku cadang, oli, BBM)	Bulan	12	139.999.921	149.999.921	3	11.937.500	3	15.626.885	3	29.683.150	3	75.316.853	12	132.564.388	100	88,38
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																100		
Predikat																Sangat Tinggi		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				311.600.000	321.600.000		4.508.100		17.120.400		275.007.800		24.422.500	0	321.058.800		99,83
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100			100		100		100		100		100		100	

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				311.600.000	321.600.000		4.508.100		17.120.400		275.007.800		24.422.500	0	321.058.800		99,83	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	50			0		30		20		0		50		100		
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	20	15.000.000	15.000.000	0	355.400	0	8.221.500	20	6.336.750	0	0	20	14.913.650	100	99,42	
		Jumlah TAGANA yang terlibat dalam Penanganan PPKS	Orang	60			0		60		0		0		60		100		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	Orang	40	25.000.000	35.000.000	20	2.414.300	0	2.547.500	20	14.255.300	0		40	15.749.200	34.966.300	100	99,90
		terfasilitasinya kegiatan TKSK	Orang	40			20		0		0		20		40		100		
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS	Kecamatan	20	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	20	8.295.500	0	526.500	20	8.822.000	100	98,02	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia,LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	Kegiatan	12	262.600.000	262.600.000	3	1.738.400	3	6.351.400	3	246.120.250	3	8.146.800	12	262.356.850	100	99,91	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100		
Predikat																	Sangat Tinggi		

01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				14.714.000	14.714.000		393.660		370.000		13.285.000	0	0	14.048.660		95,48	
407.01.008	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial													0	0	0	0,00	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		%	100	14.714.000	14.714.000	100	393.660	100	370.000		13.285.000	0	100	14.048.660	0	95,48	
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100			100		100		100		100		100		100	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif	Orang	10			0		0	10		0		10		100		
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	14.714.000	14.714.000		393.660		370.000		13.285.000	0		14.048.660		95,48	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																100		
Predikat																Sangat Tinggi		

01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.808.814.000	1.817.814.000		170.793.612		649.448.634		358.318.881		463.530.473	0	1.642.091.600		90,33
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.056.368.400	1.065.368.400		135.679.262		380.256.754		189.433.381		294.735.473	0	1.000.104.870		93,87
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100			100		100		100		100		100		100	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial		1,22			0,40		1,38		2,57		2,53		100		100	

1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial TerlantarPenyandang g Disabilitas melalui RPS	%	100	6.584.000	6.584.000	25	1.616.600	25	1.969.800	25	2.020.000	25	957.000	100	6.563.400	100	99,69
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut Usia terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang Disabilitas melalui RPS	%	100	3.900.000	3.900.000	25	0	25	3.900.000	25	0	25	0	100	3.900.000	100	100,00
407.02.008	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi Disabilitas (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)	Buah	50	54.675.000	54.675.000	41	810.000	46	29.039.400	5	1.030.000	9	23.459.900	101	54.339.300	100	99,39
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayannya Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS	%	100	3.937.500	3.937.500	25	935.000	25	1.554.500	25	1.370.000	25	0	100	3.859.500	100	98,02
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya Fasilitasi Bimbingan Fisik, mental dan soial bagi klien penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	%	100	6.497.000	6.497.000	25	0	25	6.493.400	25	0	25	0	100	6.493.400	100	99,94

1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien terlantar melalui RPS	%	100	237.150.400	246.150.400	25	58.224.262	25	54.979.774	25	62.564.824	25	68.997.861	100	244.766.721	100	99,44
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Adanya Layanan Pemberian Akses ke Layanan ke Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar	%	100	2.122.500	2.122.500	25	0	25	2.075.000	25	0	25	0	100	2.075.000	100	97,76
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui RPS	%	100	3.000.000	3.000.000	25	114.400	25	282.000	25	500.000	25	2.015.000	100	2.911.400	100	97,05
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	%	100	729.720.000	729.720.000	25	72759000	25	279.518.700	25	117.636.057	25	196.791.712	100	666.705.469	100	91,36
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	%	100	4.739.000	4.739.000	25	1.220.000	25	329.780	25	1.567.500	25	1.338.000	100	4.455.280	100	94,01

1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya layanan rujukan bagi klien yang memerlukan	%	100	4.043.000	4.043.000	25	0	25	114.400	25	2.745.000	25	1.176.000	100	4.035.400	100	99,81	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				752.445.600	752.445.600		35.114.350		269.191.880		168.885.500		168.795.000	0	641.986.730		85,32	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terfasilitasinya bantuan Transportasi untuk orang Terlantar dalam Perjalanan	%	100			25		25		25		25		100		100		
		Tersedianya Bantuan dan Asistensi Sosial untuk Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar	%	100	719.999.900	719.999.900		31.223.450		257.702.800		156.841.000		164.304.000		610.071.250		84,73	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar	%	100	2.988.000	2.988.000	25	1.335.000	25	1.622.400	25	0	25	0	100	2.957.400	100	98,98	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar	%	100	6.499.800	6.499.800	25	0	25	6.493.300	25	0	25	0	100	6.493.300	100	99,90	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar	%	100	4.000.000	4.000.000	25	24.000	25	0	25	3.968.000	25	0	100	3.992.000	100	99,80	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.	%	100	2.976.500	2.976.500	25	500.000	25	735.280	25	1.055.000	25	460.000	100	2.750.280	100	92,40	

1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar	%	100	3.999.900	3.999.900	25	1.200.900	25	0	25	2.007.500	25	790.000	100	3.998.400	100	99,96
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus kasus Klien RPS terlantar	%	100	3.993.500	3.993.500	25	0	25	863.100	25	1.612.500	25	1.450.000	100	3.925.600	100	98,30
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan	%	100	3.998.000	3.998.000	25	125.000	25	0	25	2.494.000	25	1.254.500	100	3.873.500	100	96,89
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial	Kegiatan	1	3.990.000	3.990.000	0	706.000	1	1.775.000	0	907.500		536.500	1	3.925.000	100	98,37
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																100		
Predikat																Sangat Tinggi		
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				4.470.002.780	16.719.798.280		22.538.482		127.337.952		162.283.107		15.422.776.064		15.734.935.605		94,11
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				1.059.987.500	1.061.987.500		905.900		2.737.800		637.450		1.056.224.800		1.060.505.950		99,86
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100			100		100		100		100		100		100	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 8 Panti (381 anak x 365 hr x Rp 7500 dan Fasilitasi 10 Jt)	Anak	321	1.046.987.500	1.048.987.500	0	0	0	1.791.600	0	120.000	321	1.046.564.900	321	1.048.476.500	100	99,95

1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Proses Adopsi Anak	%	100	8.000.000	8.000.000	25	905.900	25	946.200	25	180.000	25	5.221.900	100	7.254.000	100	90,68	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Porseni Anak Panti	%	100	5.000.000	5.000.000	25	0	25	0	25	337.450	25	4.438.000	100	4.775.450	100	95,51	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				3.410.015.280	15.657.810.780		21.632.582		124.600.152		161.645.657		14.366.551.264		14.674.429.655		93,72	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	80				86,42		100				86,67		100		100	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	90				79,13		91				79,19		91,11		100	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,1				157,4		100				100		100		100	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48				67,86		54,73				54,12		54,12		100	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	Kegiatan	16	191.100.000	191.100.000	6	19.944.682	7	54.260.002	5	19.652.457	6	61.490.508	24	155.347.649	100	81,29	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	%	100	15.000.000	15.000.000	25	750.900	25	195.000	25	757.500	25	12.479.500	100	14.182.900	100	94,55	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Terfasilitasinya Bantuan Sosial KJS	%	100	75.000.000	12.322.795.500	25	937.000	25	5.703.000	25	110.512.000	25	11.274.783.656	100	11.391.935.656	100	92,45	

1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya 289 KUBE @ Rp 8,5 Juta & 63 PM UEP @ Rp 4 juta dan Fasilitasi Rp 343.821000.	%	100	3.128.915.280	3.128.915.280	25	0	25	64.442.150,00	25	30.723.700	25	3.017.797.600	100	3.112.963.450	100	99,49
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100	
Predikat																	Sangat Tinggi	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2.618.679.000	4.018.679.000		231.365.800		1.415.540.600		931.281.750		1.439.419.900	0	4.017.608.050		99,97
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2.535.000.000	3.935.000.000		217.133.800		1.372.619.100		918.491.250		1.425.744.900	0	3.933.989.050		99,97
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100			100		100			100		100		100		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	%	100	60.000.000	60.000.000	25	7.355.000	25	10.756.900	25	25.008.500	25	16.740.000	100	59.860.400	100	99,77
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	%	100	50.000.000	50.000.000	25	4.400.000	25	31.493.300	25	13.844.000	25	150.000	100	49.887.300	100	99,77
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/Keluarga Rentan di Kab Temanggung	Orang	1600	2.425.000.000	3.825.000.000	135	205.378.800	882	1.330.368.900	583	879.638.750	927	1.408.854.900	2.527	3.824.241.350	100	99,98
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				83.679.000	83.679.000		14.232.000		42.921.500		12.790.500		13.675.000		83.619.000		99,93

1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Meningkatnya Kemampuan Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung	%	100	5.000.000	5.000.000	25	0	25	4.975.000	25	0	25	0	100	4.975.000	100	99,50
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya penanggulangan bencana Forum TAGANA dan Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung	%	100			25		25		25		25		100		100	
		Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana	%	100			25		25		25		25		100		100	
		Terlaksananya Capacity Building dalam rangka peningkatan Skli Forum Tagana	Kegiatan	1	78.679.000	78.679.000	0	14.232.000	1	37.946.500	0	12.790.500	0	13.675.000	1	78.644.000	100	99,96
		Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana (Forum KSB) bersama relawan Tagana dengan rakor dan pelatihan	Kegiatan	2			3		3		3		0		9		100	
		Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana	hari	365			90		91		90		94		365		100	

		Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana	Kegiatan	4			1		1		1		1		4		100	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	100	
Predikat																	Sangat Tinggi	
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				65.664.000	65.664.000		8.330.000		16.320.000		27.744.100		13.027.000		65.421.100		99,63
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				65.664.000	65.664.000		8.330.000		16.320.000		27.744.100		13.027.000		65.421.100		99,63
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100			100		100		100		100		100		100	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	Lokasi	2	65.664.000	65.664.000	0	8.330.000	2	16.320.000	0	27.744.100	0	13.027.000	2	65.421.100	100	99,63
Jumlah					13.841.787.036	27.804.660.046		1.377.686.010		3.514.114.927		3.089.541.073		18.529.835.493		26.511.177.503		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	100	
PREDIKAT																	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	100	
PREDIKAT																	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	100	
PREDIKAT																	TelahTercapai	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
	PROGRAM/	PROGRAM/KEGIATAN					I		II		III		IV						
	KEGIATAN	TAN		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.355.650.758	5.355.650.758		963.136.835		1.860.210.722		0		0		2.823.347.557			
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.286.581.208	4.286.581.208		732.319.841		1.612.414.023		0		0		2.344.733.864			54,70
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	4.286.581.208	4.286.581.208	41	732.319.841	41	1.612.414.023					41	2.344.733.864	100,00		54,70
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				116.742.000	116.742.000		27.494.311		21.340.950		0		0	0	48.835.261			41,83
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	8.000.000	8.000.000	0		1	2.954.500					1	2.954.500	25,00		36,93
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	15.000.000	15.000.000	1	1.186.600	2	4889500					3	6.076.100	50,00		40,51
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	10.000.000	10.000.000	0	1.466.600	2	3.823.950					2	5.290.550	33,33		52,91
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	53.772.000	53.772.000	3	8.094.001	4	6.835.500					7	14.929.501	35,00		27,76

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	29.970.000	29.970.000	2	16.747.110	2	2.837.500				4	19.584.610	40,00	65,35		
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				797.327.750	797.327.750		181.253.283		187.899.849			0	0	0	369.153.132		46,30	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6.000.000	6.000.000	1	0	2	1.263.750				3	1.263.750	50,00	21,06		
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	75.000.000	75.000.000	1	16.691.222	2	17.198.245				3	33.889.467	50,00	45,19		
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	16.999.000	16.999.000	0	415.000	2	862.000				2	1.277.000	33,33	7,51		
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	699.328.750	699.328.750	1	164.147.061	1	168575854				2	332.722.915	50,00	47,58		
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				154.999.800	154.999.800		22.069.400		38.555.900			0	0	0	60.625.300		39,11	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	93	130.000.000	130.000.000	10	22.069.400	15	36.771.500				25	58.840.900	26,88	45,26		
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	24.999.800	24.999.800	0		1	1.784.400				1	1.784.400	25,00	7,14		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan															43,21				

																Predikat		Tinggi	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				390.750.000	390.750.000		3.137.800		3.329.000		0		0	0	6.466.800		1,65	
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100			100		100					100		100			
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				390.750.000	390.750.000		3.137.800		3.329.000		0		0	0	6.466.800		1,65	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	7	390.750.000	390.750.000	1	3.137.800	3	3.329.000				4	6.466.800	57	1,65		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	28,57		
																Predikat		Rendah	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																		
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		%	100	0	0	100	0	100	0		0		0	100	0	0	0,00	

		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100		100		100						100		100		
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				771.479.250	771.479.250		90.019.275		217.056.724		0	0	0	307.075.999		39,80	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				767.479.250	767.479.250		88.314.025		216.328.724		0	0	0	304.642.749		39,69	
		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100			100		100					100		100		
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100			100		100					100		100		
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100			100		100					100		100		
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100			100		100					100		100		

1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	9.999.900	9.999.900	2	1.382.250	3	2.282.000					5	3.664.250	25,00	36,64
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	10.000.000	10.000.000	0	0	0	9.782.000					0	9.782.000	0,00	97,82
407.02.008	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	19	36.904.700	36.904.700	4	3.260.690	0	30.910.000					4	34.170.690	21	92,59
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	5.000.000	5.000.000	0	590.000	1	480.000					1	1.070.000	33	21,40
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	5.000.000	5.000.000	0	0	0	581.000					0	581.000	0	11,62
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	232.575.150	232.575.150	13	55.336.585	22	49.575.774					35	104.912.359	41	45,11
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	2.000.000	2.000.000	0	868.000	1	486.750					1	1.354.750	50	67,74

1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	2.000.000	2.000.000	0	0	3	687.000					3	687.000	30	34,35
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	89	460.000.000	460.000.000	5	24.503.000	76	121.038.200					81	145.541.200	91	31,64
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	1.999.500	1.999.500	0	686.500	1	220.000					1	906.500	33,33	45,34
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	2.000.000	2.000.000	1	1.687.000	4	286.000					5	1.973.000	500,00	98,65
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				4.000.000	4.000.000		1.705.250		728.000			0	0	0	2.433.250		60,83
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,2 2					13,23					4,22		100,00		
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.000.000	2.000.000	3	1.225.250	1	300.000					4	1.525.250	80,00	76,26

1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	2.000.000	2.000.000	1	480.000	2	428.000				3	908.000	75,00	45,40	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																75,38		
Predikat																Sangat Tinggi		
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				26.342.710.90 0	26.342.710.90 0		35.876.842		165.862.641		0	0		201.739.483		0,77	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				1.125.372.550	1.125.372.550		1.469.000		2.749.000		0	0		4.218.000		0,37	
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100			100		100					100		100		
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	446	1.125.372.550	1.125.372.550		1.469.000	0	2.749.000				0	4.218.000	0	0,37	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				25.217.338.35 0	25.217.338.35 0		34.407.842		163.113.641		0	0		197.521.483		0,78	
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	85			100		100					0		100		
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	95			93,59		94,25					0		100		
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,2			100		100					0		100		

		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48			53,69		51,91					0		100			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Kota yang di data	orang	411.885	118.366.000	118.366.000	0	16.137.282	411.885	24.792.391				411.885	40.929.673	100	34,58		
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	60.290	22.780.547.350	22.780.547.350	0	14.810.677	0	17.340.250				0	32.150.927	0	0,14		
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.810	2.318.425.000	2.318.425.000	0	3.459.883	0	120.981.000				0	124.440.883	0	5,37		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																25,00			
Predikat																Sangat Rendah			
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.650.000.000	1.650.000.000		860.090.850		738.826.600			0	0	0	1.598.917.450		96,90	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				1.590.000.000	1.590.000.000		838.605.850		723.626.600			0	0	0	1.562.232.450		98,25	
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100			100		100					100		100			

1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	40.000.000	40.000.000	28	6.675.750	32						60	15.205.250	40,00	38,01	
										8.529.500									
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	40.000.000	40.000.000	125	38.299.600	25	1.698.500					150	39.998.100	100,00	100,00	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1000	1.510.000.000	1.510.000.000	527	793.630.500	473	713.398.600					1.000	1.507.029.100	100,00	99,80	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				60.000.000	60.000.000		21.485.000		15.200.000	0	0				36.685.000		61,14	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60.000.000	60.000.000	20	21.485.000	15	15200000					35	36.685.000	58,33	61,1416667	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																	74,58		
Predikat																	Sangat Tinggi		
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				52.919.550	52.919.550		14.948.750		10.284.600	0	0				25.233.350		47,68	

1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				52.919.550	52.919.550		14.948.750		10.284.600		0		0		25.233.350		47,68	
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100			100								100		100		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	2	52.919.550	52.919.550	2	14.948.750	2	10.284.600					4	25.233.350	100	47,68	
Jumlah					34.563.510.458	34.563.510.458		1.967.210.352		2.995.570.287		0		0		4.962.780.639			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	100		
PREDIKAT																	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	57,79		
PREDIKAT																	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	100,00		
PREDIKAT																	TelahTercapai		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

I. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - f. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - g. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - h. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - i. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - j. Pemberian Layanan Rujukan
8. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- a. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - b. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

- d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - e. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - f. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - g. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - h. Pemberian Layanan Rujukan
 - i. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
9. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - b. Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
10. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang
12. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
13. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

II. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Alat Bantu
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Dari penjelasan atas tabel 2.1 dapat dikatakan bahwa semua capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target bahkan ada 3 sub kegiatan yang melebihi target. Akan tetapi bukan berarti sudah tidak ada masalah atau Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi semua kebutuhannya, karena sebagaimana adanya masalah sosial menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena dalam berinteraksi antar anggota masyarakat tidak semuanya berlangsung secara positif, namun juga dapat memicu munculnya pertentangan, konflik, dan masalah yang muncul dari individu maupun dari hasil hubungan tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi PPKS dengan segala permasalahan yang dihadapi tidak hanya butuh penanganan satu layanan saja dan terkadang sesuai hasil assesmet akan membutuhkan layanan yang lainnya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial Triwulan I Tahun 2022
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	48	48	63	63	63	na	na	116,70	64,30	-	84,39	TT
2	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	100,00	TT
3	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	TT
4	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	TT
5	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	100,00	TT
6	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	100,00	TT
7	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	-	100,00	TT
8	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,18	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	2,20	4,22	-	13,23	TT
9	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang	%	100	100	100	100	100	100	0	100,00	100,00	-	0,00	TT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	mendapatkan bantuan jaminan sosial-													
10	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	n.a	75	80	85	54	63	98,78	100,00	-	100,00	TT
11	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	n.a	n.a	85	90	95	100	100	78,44	91,11	-	99,21	UK
12	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	n.a	n.a	10	10,1	10,2	-	-	63,72	100,00	-	100,00	TT
13	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48	48	48	46	83	111,90	61,70	-	100,00	TT
14	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	-	100,00	TT
15	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	TT

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2023

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- I. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 14 terdiri dari:
 - a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.
 - b. Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial,
 - c. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - d. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - e. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - f. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
 - g. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
 - h. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial.
 - i. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial.
 - j. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota.
 - k. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan.
 - l. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
 - m. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial.
 - n. Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.
 - b. Meningkatnya kemampuan dan keinginan dari PSKS untuk berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial, terbukti dengan meningkatnya peran serta PSKS dalam ikut mengatasi

permasalahan sosial yang ada di lingkungannya dan masyarakat sekitarnya.

- c. Adanya anggaran dari pemerintah berupa bantuan sosial.
 - d. Adanya bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial yang dapat membantu dalam menangani PPKS yang membutuhkan.
 - e. Adanya Rumah Singgah dan adanya tenaga profesional dibidangnya.
 - f. Adanya anggaran APBD II, Adanya dukungan kerjasama dengan instansi terkait baik UPT Dinas Sosial Provinsi maupun UPT Kementerian Sosial.
 - g. Adanya dukungan kerjasama dengan pengurus panti asuhan sehingga bansos di Anggaran Perubahan tersalur sesuai target waktu.
 - h. Adanya dukungan dari Dana Desa terhadap pendataan Fakir Miskin.
 - i. Adanya dukungan kerjasama baik dengan Pendamping UEP KUBE, Pengurus KUBE maupun Pemerintah Desa.
 - j. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Temanggung dilihat dari data DKD Kabupaten Temanggung.
 - k. Sudah adanya dan solidnya relawan bencana yang siap untuk penanganan bencana di Kab. Temanggung.
 - l. Taman makam pahlawan merupakan penghargaan bagi jasa para pahlawan.
2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Masih terdapat exclusion error dan inclusion error dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan.
 - b. Kurangnya anggaran fasilitasi bagi peningkatan kemampuan dan peran serta Sumber Daya Manusia PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial.
 - c. Adanya pengurangan anggaran pada fasilitasi , sehingga kegiatan bimbingan sosial tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - d. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus.
 - e. Masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas di Kabupaten Temanggung.
 - f. Masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah

- bedrest.
- g. Kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah.
 - h. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS di luar panti merupakan kegiatan respon kasus, dan terdapat kondisimasih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas, terdapatnya lansia yg tidak dapat dilayani di panti dikarenakan kondisi bedrest, dan kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.
 - i. Adanya Perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati.
 - j. Untuk Kelurahan belum memiliki anggaran untuk pendataan Fakir Miskin.
 - k. Adanya pandemi Covid 19 berdampak pada berkurangnya anggaran untuk Bansos UEP dan KUBE.
 - l. Masih ada penerima bantuan yang tidak tepat sasaran disebabkan karena data penerima bantuan berasal dari pusat dan tidak diadakan verval oleh daerah.
 - m. Kurangnya anggaran, sehingga kita tidak bisa melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana
 - n. Kurangnya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasaran makam, dan juga untuk pembuatan lobang makan yang merupakan salah satu pelayanan dan fasilitasi yang diberikan kepada jenazah para pahlawan dan keluarganya.
4. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan Pemberian anggaran untuk fasilitasi dan pembinaan kegiatan PSKS. Pemberian tali asih sebagai penghargaan terhadap kinerja PSKS.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan eks pekerja migran bermasalah sosial dan ekonomi.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ UPT kementerian Sosial yang menangani terkait permasalahan anak.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan UPT Kementerian sosial

- (Centra Terpadu Kartini) dalam penanganan disabilitas di Kabupaten Temanggung.
- e. Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penanganan lansia terlantar, terus melakukan koordinasi dengan pemprov terkait pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar yang mengalami kedisabilitas.
 - f. Perlu adanya dukungan anggaran untuk operasional rumah singgah.
 - g. Koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.
 - h. Selalu Koordinasi dan komunikasi dengan pengurus panti terkait perubahan kebijakan.
 - i. Mengusulkan adanya anggaran khusus pendataan Fakir Miskin di Kelurahan.
 - j. Memotivasi UEP KUBE yang masih ada, agar mempertahankan kegiatan usaha ekonomi produktif dan menjalin Kemitraan
 - k. Untuk diadakan verval data penerima yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan data penerima bantuan.
 - l. Penambahan anggaran penanganan bencana.
 - m. Penambahan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana taman makam pahlawan dan untuk pembuatan lobang makam.

II. Capaian indikator dengan status upaya keras ada satu terdiri dari:

1. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota.
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya penambahan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan sosial dari sumber DBHCHT.
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dengan Disdukcapil terkait percepatan perekaman KTP elektronik.

2.2.2.Data Pokok

Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2018-2023 s.d TW II

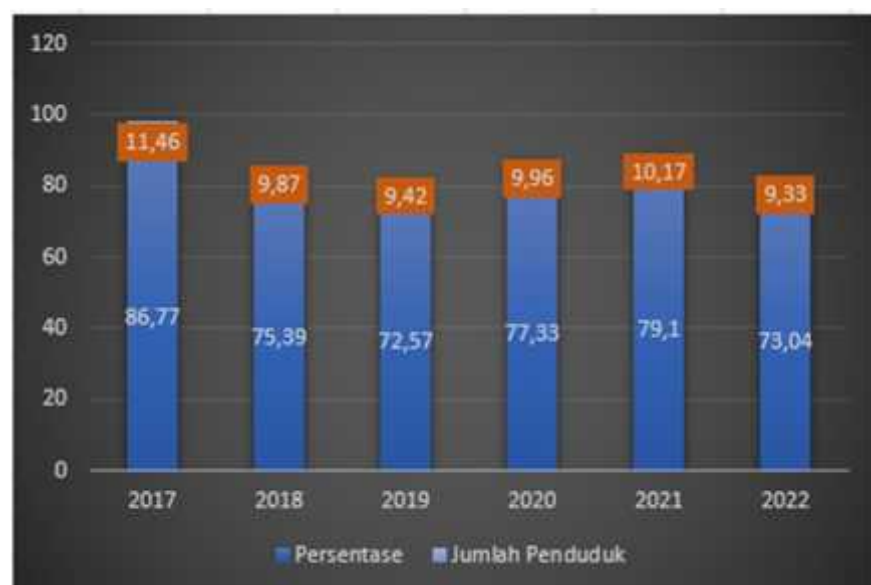
No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk miskin	75.390	72.570	77.330	79.100	73.040	73.040
2.	Jumlah penduduk	763829	770.382	794.055	800.276	800.267	800.267
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,87	9,42	9,96	10,17	9,33	9,33

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2020 dan 2021. Dan pada Tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 9,33.

Gambar 2.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada Tahun

2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian Tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96%, dan untuk kondisi Tahun 2021 dari target 10,36 terealisasi 10,17 dengan status akan tercapai tercapai. Dan pada Tahun 2022 target angka kemiskinan adalah 10% dan dari hasil rilis BPS tercapai 9,33%. Sedangkan pada Tahun 2023 triwulan I belum ada hasil penghitungan angka kemiskinan dari BPS, sehingga di Data Pokok masih dicantumkan angka kemiskinan kondisi triwulan IV tahun 2022.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 2.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung, 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 2.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020, dan meningkat tajam di Tahun 2021 sebesar 0,71 dan di Tahun 2022 turun menjadi 1,06 dari 1,57 di tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 dibandingkan dengan Jawa Tengah. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan kenaikan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,05 menjadi 0,11 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,39 dan menjadi 0,19 pada Tahun 2022.

A. Bidang Sosial

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus dari Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dibagi KK DKD dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2018 s.d 2023 s/d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang ditangani
Tahun 2023 s.d TW II

No.	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK miskin yang dilayani	50.344	48.863	101.684	141.064	79745	78.971
2	jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun	101.993	103.280	120.876	120.876	150509	148.539
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	49,36	47,31	84,12	116.70	64,30	53,17

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW II

Dari tabel di atas dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 triwulan IV mengalami kenaikan secara signifikan, begitu juga pada tahun 2023 triwulan II juga mengalami kenaikan akan tetapi untuk ketercapaian masih 84,29 %. Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya utamanya di triwulan ke IV akan tercapai 100%. Faktor penghambat pada indikator ini antara lain terdapat beberapa kegiatan yg masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan perubahan dan mekaniske penyaluran bansos DBHCHT. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN).

Tabel 2.6

Data Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
Tahun 2023 s.d TW II

NO	KECAMATAN	DBHCH T	Disabilitas, AT, LUT, TS	Anak Panti	UEP/ KUBE	Jumlah Penerima Bansos	Korban Bencana
1	Temanggung	0	273	0	13	6421	4
2	Tlogomulyo	0	69	0	20	2229	5
3	Kranggan	0	81	0	27	3272	3
4	Tembarak	0	80	0	11	3682	0
5	Selopampang	0	49	0	12	2252	0
6	Pringsurat	0	54	0	13	4569	3
7	Kaloran	0	69	0	42	4983	33
8	Parakan	0	73	0	14	5491	4
9	Bansari	0	41	0	12	2220	5
10	Kledung	0	45	0	11	2351	4
11	Kedu	0	67	0	14	5092	5
12	Bulu	0	95	0	14	5354	4
13	Kandangan	0	59	0	12	5277	14
14	Candiroto	0	65	0	12	3928	1
15	Bejen	0	27	0	11	2724	0

16	Jumo	0	61	0	11	3463	1
17	Gemawang	0	72	0	10	3441	6
18	Tretep	0	29	0	11	2374	6
19	Wonoboyo	0	29	0	11	2523	0
20	Ngadirejo	0	74	0	12	8099	1
21	Luar Daerah	0	29	0			
22	Tidak teridentifikasi	0	18	0			
	JUMLAH TOTAL	0	1459	0	301	77.112	99

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW II

3. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, FK PSM, KT, SLRT/Puskesmas, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
9. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
10. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
11. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan

masalahnya secara lebih intensif.

12. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
14. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s/d 2023 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	130	162	243	167	220	163
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	130	162	243	167	220	163
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikutsertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung .

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 Triwulan II sejumlah 163 orang terdiri dari 25 PSM, 16 KT, 20 orang TKSK, 66 orang Tagana, 13 orang Penyuluh Sosial, 10 pekerja sosial dan 1 IPSM, 1 LKKS, 2 LKS, 9 LKSA

Dan dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesos berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesmas Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2023 ini masih terus melayani masyarakat .

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesmas Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Puskesmas Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan Puskesmas Desa Pare Kecamatan Kranggan

Pada awal Tahun 2022 ini Puskesmas Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesmas Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh sosial dan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.8

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung

Tahun 2023 TW II

No	Kecamatan	PSKS											Jumlah	
		PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Pensos dan Peksos	TKSK	Keluarga Pioner	LK3	LKKS	LKS	LKSA		
1	Bansari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Bejen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bulu	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Candiroto	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Gemawang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Jumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	Kaloran	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	Kandangan	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Kedu	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	Kledung	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Kranggan	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
12	Ngadirejo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	Parakan	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Pringsurat	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
15	Selopampang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	Temanggung	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
17	Tembarak	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Tlogomulyo	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Tretep	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Wonoboyo	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	66	23	20	0	0	1	2	9	
	Jumlah	25	16	1	66	23	20	0	0	1	2	9	40

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

4. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut :
 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9

Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20	10	10	10	10	0
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang	20	10	10	10	10	0

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	memerlukan rehabilitasi social						
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan ketrampilan. Selain itu, data tersebut juga menerima bantuan sosial berupa bahan kebutuhan dasar serta bantuan stimulan untuk usaha ekonomi produktif. Pada Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung belum ditetapkan untuk penanganan eks migran bermasalah sosial. Capaian target rehabilitasi bagi eks migran bermasalah adalah jumlah eks migran bermasalah sosial yang membutuhkan layanan dapat terlayani semua, mulai Tahun 2018 Dinas Sosial menangani 20 kasus eks migran bermasalah dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 20, sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat tertangani atau terbantu. Tahun 2019 s/d 2022 kasus yang ditangani mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Untuk kondisi Tahun 2023 triwulan pertama ini jika ada kasus terlapor tetap akan di respon dengan pendampingan akan tetapi tidak diberikan bantuan sosial untuk pengembangan ekonomi produktif.

Tabel 2.10

Data Eks Migran Bermasalah Sosial
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023 s.d TW II

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Temanggung	0
2	Tlogomulyo	0
3	Kranggan	0
4	Tembarak	0
5	Selopampang	0

NO	KECAMATAN	Eks Migran
6	Pringsurat	0
7	Kaloran	0
8	Parakan	0
9	Bansari	0
10	Kledung	0
11	Kedu	0
12	Bulu	0
13	Kandangan	0
14	Candiroto	0
15	Bejen	0
16	Jumo	0
17	Gemawang	0
18	Tretep	0
19	Wonobojo	0
20	Ngadirejo	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	0

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW II

5. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11

Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	90	53	41	271	364	469
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	90	53	41	271	364	469
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	7	-	27	19	8	15
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	10	23	10	13	10	-
	c. Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	23	20	4	4	4	2
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	50	10	41	235	342	453
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2019 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 342 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2022 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembatasan seperti saat pandemi Covid Tahun 2021 sehingga diperlukan penyesuaian kembali setelah masa pandemi. Dan pada tahun 2023 tri wulan II terdapat 469 penanganan Anal Terlantar dan tercapai 100%.

Tabel 2.12
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023 s.d TW II

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	Temanggung	3		2	85	90
2	Tlogomulyo				16	16
3	Kranggan				13	13
4	Tembarak				25	25
5	Selopampang	1			28	29
6	Pringsurat				9	9
7	Kaloran				25	25
8	Parakan	2			18	20
9	Bansari	1			16	17
10	Kledung				16	16
11	Kedu				12	12
12	Bulu	1			44	45
13	Kandangan				12	12
14	Candiroto	1			29	30
15	Bejen				3	3
16	Jumo				9	9
17	Gemawang	1			43	44
18	Tretep				9	9
19	Wonobojo				7	7
20	Ngadirejo				32	32
21	Luar Daerah	4			2	6
	JUMLAH TOTAL	15	0	2	455	469

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW II

6. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13

Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	247	536	583	619	514
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	40	247	536	583	619	514
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari data yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu

5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 2.14
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2023 sampai dengan TW II

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	22
2	Kledung	17
3	Bansari	24
4	Bulu	25
5	Temanggung	46
6	Tlogomulyo	39
7	Tembarak	49
8	Selopampang	11
9	Kranggan	44
10	Pringsurat	45
11	Kaloran	10
12	Kandangan	30
13	Kedu	22
14	Ngadirejo	41
15	Jumo	12
16	Gemawang	12
17	Candiroto	12
18	Bejen	11
19	Tretep	20
20	Wonobojo	22
	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	514

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

7. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh)

sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	7	8	7	181	2246	425
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	7	8	7	181	2246	425
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Lansia

terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan.

Tabel 2.16
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2023 s.d TW II

NO	KECAMATAN	LUT
1	Bansari	0
2	Bejen	13
3	Bulu	23
4	Candiroto	21
5	Gemawang	16
6	Jumo	40
7	Kaloran	33
8	Kandangan	16
9	Kedu	33
10	Kledung	11
11	Kranggan	24
12	Ngadirejo	0
13	Parakan	31
14	Pringsurat	0
15	Selopampang	9
16	Temanggung	135
17	Tembarak	5
18	Tlogomulyo	14
19	Tretep	0
20	Wonoboyo	0
21	Luar Daerah	1
	JUMLAH TOTAL	425

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

8. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar pantidigunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	184	182	77	103	88	52
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	184	182	77	103	88	52
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 8.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami fluktuatif dari Tahun 2018 – 2022 hal ini karena di Tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya.

Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 2.18
Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2023 TW II

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung		
3	Bulu	Temanggung	2	
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung		
6	Jumo	Temanggung		
7	Kaloran	Temanggung	1	
8	Kandangan	Temanggung	1	
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung		
12	Ngadirejo	Temanggung	1	
13	Parakan	Temanggung		
14	Pringsurat	Temanggung		
15	Selopampang	Temanggung		
16	Temanggung	Temanggung	2	
17	Tembarak	Temanggung	1	
18	Tlogomulyo	Temanggung		
19	Tretep	Temanggung		
20	Wonobooyo	Temanggung		
21	Luar daerah		22	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		19	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			52	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

9. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui

balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial
Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	321	349	591	1.138	3.317	1.459
	- disabilitas terlantar	40	247	536	583	619	514
	- anak terlantar	90	54	41	271	364	469
	- lanjut usia terlantar	7	8	7	181	2246	425
	- tuna sosial diluar panti sosial	184	40	7	103	88	51
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi social	27.277	26.440	26.883	26973	28.645	34.556
	- disabilitas terlantar	5.970	5.186	5.685	5.685	4.571	4.700
	- anak terlantar	865	609	609	609	381	4.700
	- lanjut usia terlantar	20.134	20.561	20.651	20.651	23.671	25.133
	- tuna sosial diluar panti sosial	308	84	28	28	31	23

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.18	1,31	2,20	1.91	1,16	13,23

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari Tahun 2018 - 2022 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada Tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Pada tahun 2023 triwulan II telah tercapai 13,23 % dari target 1,22 %. Ketercapaian sampai dengan tahun 2023 100 % dengan status telah tercapai.

Tabel 2.20

Rekapitulasi Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Luar Panti Sosial Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Rekapitulasi PPKS yang direhabilitasi						4571
1	disabilitas terlantar	40	247	536	583	305	514
2	anak terlantar	90	54	41	271	213	469
3	lanjut usia terlantar	7	8	7	181	152	425
4	tuna sosial diluar panti sosial	184	40	7	103	68	51
II	Rekapitulasi PPKS	27.277	26.440	26.883	26973	28713	34.556
1	disabilitas terlantar	5.970	5.186	5.685	5.685	4.626	4.700
2	anak terlantar	865	609	609	609	381	4.700
3	lanjut usia terlantar	20.134	20.561	20.651	20.651	23671	25.133
4	tuna sosial diluar panti sosial	308	84	28	28	35	23

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Tabel 2.21

Data Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang ditangani di Luar Panti Sosial (persebaran kecamatan) Tahun 2023 S/D triwulan II

NO	KECAMATAN	Disabilitas terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng
1	Bansari	24	17	0	
2	Bejen	11	3	13	
3	Bulu	25	45	23	2
4	Candiroto	12	30	21	2
5	Gemawang	12	44	16	
6	Jumo	12	9	40	
7	Kaloran	10	25	33	1
8	Kandangan	30	12	16	1
9	Kedu	22	12	33	
10	Kledung	17	16	11	1
11	Kranggan	44	13	24	
12	Ngadirejo	41	32	0	1
13	Parakan	22	20	31	
14	Pringsurat	45	9	0	
15	Selopampang	11	29	9	
16	Temanggung	46	90	135	2
17	Tembarak	49	25	5	1
18	Tlogomulyo	39	16	14	
19	Tretep	20	9	0	
20	Wonobojo	22	7	0	
21	Luar Daerah		6	1	22
22	Tidak Diketahui Alamat				18
	JUMLAH	514	469	425	51

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

10. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan

wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 9 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 2.22

Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial

Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	371	371	381	381	321	-
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial	371	371	381	381	321	-
3.	Persentase	100	100	100	100	100	0

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung tetap, disebabkan oleh faktor dari dalam panti mulai dari ketersediaan jumlah sarana prasarana, jumlah SDM Pengelola Panti khususnya pengasuh dan pembimbing di panti, atau dari faktor anak panti itu sendiri. Dari beberapa tahun berjalan, ketahanan tiap anak berbeda, ada anak mampu beradaptasi

dengan kehidupan di panti dan ada juga anak yang kurang mampu beradaptasi, sehingga kemudian meninggalkan panti asuhan/ memutuskan untuk tidak lagi tinggal di panti.

Bantuan permakanan panti Tahun 2023 belum dilakukan pencairan pencairan dari quota awal 446 anak di 11 panti dan setelah dilakukan verifikasi ulang terdapat 2 panti yang tidak memenuhi syarat administratif (Surat Izin Operasional/ SIOP panti sudah kadaluarsa) sehingga harus diperbarui masa aktif nya. Sampai dengan triwulan I Tahun 2023 masih 0 % dan sesuai dengan jadwal akan tercapai di triwulan III Tahun 2023. Adanya Perubahan penerima menyebabkan Perubahan di Anggaran Perubahan dan SK Bupati.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang.

Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 2.23
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan II

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhammadiyah Putra	40
3.	PAY Muhammadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Al Ihsan Temanggung	18
8.	PA. Al Hidayatul Islamiyah Munawiri	9
9.	PA. Disabilitas Rungu Abata	38
	JUMLAH	321

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung, 2023

11. Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah proses pengumpulan dan pemutahiran data (verifikasi dan validasi) orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya di wilayah Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan disini adalah data rumah tangga miskin yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Temanggung, dimana data ini menjadi *single data* yang digunakan dalam Program/kegiatan Jaminan dan perlindungan sosial.

Rumus dari Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota adalah Jumlah rumah tangga dalam DTKS yang diverval dibagi jumlah rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah time series selama 5 tahun tentang Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota di Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.24
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota
Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah jiwa dalam DTKS yang diverval	n.a	56.414	68.262	490.347	420.593	411.885
2.	Jumlah jiwa dalam DTKS	n.a	104.120	108.695	496.392	420.593	411.885
3.	Persentase	n.a	54.18%	63.80%	98,78%	100,00%	100,00%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pendataan fakir miskin mengalami kenaikan sebesar 9% pada Tahun 2020 dibanding tahun 2019, naik lagi 34,98 % pada 2021 Triwulan IV dan mencapai 100% pada Triwulan 4 tahun 2022. Terdapat perbedaan tentang verval pada Tahun 2021 dan 2022 dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah jiwa sedangkan tahun sebelumnya menggunakan data Rumah Tangga. Hal ini karena Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 88/HUK/2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Baru 31 Agustus 2021, sudah tidak memuat data Rumah Tangga, sehingga verval menggunakan data Jiwa.

Disamping itu, mulai akhir Tahun 2021 DTKS sudah tidak merupakan database penduduk miskin, tetapi merupakan database penerima bantuan sosial. Tahun 2022 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang mana saja yang masuk dalam kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk yang sudah dipandang mampu oleh Desa/Kelurahan,

tidak ditetapkan dalam Data Kemiskinan Daerah. Perhitungan triwulan IV Tahun 2022 sepenuhnya menggunakan Data Kemiskinan Daerah.

RPJMD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas Sosial untuk Tahun 2023 ditargetkan persentase akan meningkat menjadi 85% dan sudah tercapai pada Tahun 2023 triwulan II karena capaiannya sudah melebihi, yaitu 100 %. Adapun yang di verval adalah NIK, Status Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu, dan data ini akan ditetapkan menjadi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Adapun Rekapitulasi data hasil verval tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.25
Rekapitulasi Data Kemiskinan Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	26,611
2	Tembarak	20,152
3	Temanggung	38,960
4	Pringsurat	23,310
5	Kaloran	24,100
6	Kandangan	25,486
7	Kedu	29,093
8	Parakan	31,258
9	Ngadirejo	39,782
10	Jumo	16,290
11	Tretep	10,119
12	Candiroto	19,083
13	Kranggan	19,444
14	Tlogomulyo	11,586
15	Selopampang	13,257
16	Bansari	11,184
17	Kledung	11,381
18	Bejen	13,620
19	Wonoboyo	13,046
20	Gemawang	14,123
	J u m l a h	411,885

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

12. Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota

Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (menurut: Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu).

Data dimaksud adalah:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Data PMKS/PPKS dan PSKS
3. Data Penerima PKH
4. Data Penerima BSP / SEMBAKO
5. Data Penerima BST
6. Data Penerima PBI-JKN
7. Data Penerima Bansos Lainnya

Rumus Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin kab/kota Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS dikalikan seratus persen.

Berikut adalah tabel tentang Cakupan pengelolaan data fakir miskin kab/kota di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.26

Cakupan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial	n.a	413.890	422.930	389.391	383.195	388,208
2.	Jumlah anggota rumah tangga dalam DTKS	n.a	360.705	369.235	496.392	420.593	411.885
3.	Persentase	n.a	114.74%	114.54%	78,44%	91,11%	94.25%

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat di lihat Tahun 2023 triwulan II tercapai 94,25 % antara lain karena terkendala masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik akan tetapi seiring dengan

kegiatan berikutnya akan tercapai 100 % karena ada dukungan penambahan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan sosial dari sumber DBHCHT. Cakupan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota di wakili oleh data anggota rumah tangga yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial (bansos) yaitu Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), baik yang berasal dari APBN maupun APBD II, data yang tersaji merupakan data sampai dengan bulan Mei 2023 dikarenakan SK penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bulan Juni saat ini belum tersedia.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima PBI-JK Tahun 2023 triwulan II prosentasenya naik sebanyak 3,14% dibandingkan Tahun 2022, hal ini karena ada penambahan kuota APBN.

Tabel 2.27

Data Anggota Rumah Tangga
Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 s.d Triwulan II

No	Sumber Pembiayaan /anggaran	PBI-JK 2019	PBI-JK 2020	PBI-JK 2021	PBI-JK 2022	PBI-JK 2023
1	APBN	348.596	391.981	350.413	343.208	352,031
2	APBD I	10.648	1.470	-	-	-
3	APBD II	54.646	29.479	38.978	39.987	36,177
	Jumlah	413.890	422.930	389.391	383.195	388,208

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN Tahun 2023 Triwulan II mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV tahun 2022, sedangkan yang APBD mengalami penurunan peserta APBD yang sudah terdaftar di DTKS sebagian ada yang dialihkan ke APBN.

13. Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah

untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Banyaknya UEP/KUBE yang tidak aktif/mati suri, menjadi tantangan tersendiri bagi instansi pengampu. Di Tahun 2022 ini Dinas Sosial mengusung Konsep *UEP dan KUBE yang Berkelanjutan*, diharapkan keberadaan UEP dan KUBE bukan untuk waktu sebentar tapi dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan terus berkembang dan menularkan semangat usaha kelompok kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (ada kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang Berkelanjutan dengan menggunakan *rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%*.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s.d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28

Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan
Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	n.a	n.a	n.a	202	65	301
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	n.a	n.a	n.a	317	65	301
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	n.a	n.a	n.a	63.72	100	100

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan di Tahun 2018 s/d 2020 belum dapat diketahui berapa jumlah UEP/KUBE yang masih aktif dari jumlah UEP/KUBE yang sudah dibantu di tahun sebelumnya. Sedangkan data yang disajikan di Tahun 2021 adalah data UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 kemudian dilakukan monitoring UEP/KUBE yang masih aktif berdasarkan indikator yang ada di atas. Dan dapat diketahui pula bahwa di Tahun 2021 terdapat 369 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2020 dan di Tahun 2021 terdapat 202 UEP/KUBE yang masih aktif.

Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring di triwulan II tahun 2023 terdapat 301 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2021 dan di Tahun 2023 terdapat 301 UEP/KUBE yang masih aktif.

Tabel 2.29

Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Triwulan II

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
1	Bansari	2 UEP/ 10 KUBE
2	Bejen	2 UEP/ 9 KUBE
3	Bulu	4 UEP/ 10 KUBE

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE
4	Candiroto	2 UEP/ 10 KUBE
5	Gemawang	1 UEP/ 9 KUBE
6	Jumo	11 UEP/ 9 KUBE
7	Kaloran	2 UEP/ 40 KUBE
8	Kandangan	3 UEP/ 9 KUBE
9	Kedu	4 UEP/ 10 KUBE
10	Kledung	1 UEP/ 10 KUBE
11	Kranggan	1 UEP/ 26 KUBE
12	Ngadirejo	2 UEP/ 10 KUBE
13	Parakan	4 UEP/ 10 KUBE
14	Pringsurat	3 UEP/ 10 KUBE
15	Selopampang	2 UEP/ 10 KUBE
16	Temanggung	4 UEP/ 9 KUBE
17	Tembarak	1 UEP/ 10 KUBE
18	Tlogomulyo	11 UEP/ 9 KUBE
19	Tretep	1 UEP/ 10 KUBE
20	Wonobojo	1 UEP/ 10 KUBE
	JUMLAH TOTAL	301

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Tabel 2.30

PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- UEP/Perorangan	61 orang	Kecamatan
- KUBE	240 KUBE	Kecamatan

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa penggantian jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan belum merata, khususnya di Tahun 2023 ini pagu untuk bansos UEP dan KUBE, dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis, modal

diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana pancangan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri.

14. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. Berdasar Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial).

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2018 s.d 2023 s.d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	49.186	47.742	100.534	141.064	92864	77.112
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	101.992	103.280	120.876	120.876	150.509	148539
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	48,9	46,23	83,17	116,70	61,70	51,91

Sumber :Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2023 sampai triwulan II adalah sebanyak 1,638 dan 75,474. Jadi jumlah totalnya 77.112 KPM dengan status telah tercapai 100 %. Data ini berasal dari pusat dan belum bisa di pilah perkecamatan, menunggu data dari bank himbara Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk uang yang tersimpan dalam e-wallet sejumlah Rp. 200.000,- untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral keluarga penerima manfaat. Kelancaran dan ketepatan penyaluran program bantuan sembako ini sangat tergantung dari kebijakan pusat, baik jumlah penerima maupun waktu pelaksanaannya semua ditentukan dari pusat.

Tabel 2.32
Data PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 TW I

No	Kecamatan	Jumlah
1	Temanggung	6421
2	Tlogomulyo	2229
3	Kranggan	3272
4	Tembarak	3682
5	Selopampang	2252
6	Pringsurat	4569
7	Kaloran	4983
8	Parakan	5491
9	Bansari	2220
10	Kledung	2351
11	Kedu	5092
12	Bulu	5354
13	Kandangan	5277
14	Candiroto	3928
15	Bejen	2724
16	Jumo	3463
17	Gemawang	3441
18	Tretep	2374
19	Wonobojo	2523
20	Ngadirejo	8099
Grand Total		79745

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023 TW I

15. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan

perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2018-2023 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33

Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan
Layanan Perlindungan Sosial
Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	66	55	58	51	206	99
2.	Jumlah korban bencana	66	55	58	51	206	99
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan di triwulan II terdapat 99 KK korban bencana dan telah ditangani semua sehingga capaian target 100% telah tercapai.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 2.34
Kejadian Bencana Tahun 2023 s/d TW II

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	4 Januari 2023	Agus	Tanah Longsor	Getas	Kaloran	20	30
2	4 Januari 2023	Jumadi	Tanah Longsor	Tlogowungu	Kaloran	1	4
3	4 Januari 2023	Abdul Wakhid	Tanah Longsor	Kaloran	Kaloran	1	4
4	4 Januari 2023	Resi,Istiawana,Suwadi	Tanah Longsor	Kalimanggis	Kaloran	3	12
5	4 Januari 2023	Suratno	Tanah Longsor	Tleter	Kaloran	1	4
6	13 Januari 2023	Bonari	Kebakaran	Kledung	Kledung	1	4
7	19 Januari 2023	Siti Khomariyah	Rumah Roboh	Pengilon	Bulu	1	1
8	20 Januari 2023	Imbuh, Mujiyono	Tanah Longsor	Sucen	Gemawang	2	8
9	21 Januari 2023	Suparmi	Angin Ribut	Kedu	Kedu	1	4
10	22 Januari 2023	Damiri, Sukini	Tanah Longsor	Ngadisepi	Gemawang	2	6
11	31 Januari 2023	Supardi,Lili	Angin Ribut	Desa Tuksari	Kledung	2	6
12	8 Februari 2023	Agus Minto,Joko Susilo, Walidah	Tanah Longsor	Temanggung	Temanggung	3	10
13	15 Februari 2023	Wahono	Angin Ribut	Sungging sari	Parakan	1	3
14	17 Februari 2023	Juwahir	Tanah Longsor	Bansari	Bansari	1	2
15	18 Februari 2023	Poniyem	Tanah Longsor	Pagergunung	Bulu	1	3
16	21 Februari 2023	Mukidi, Rojiyanto,R	Tanah Longsor	Getas	Kaloran	4	15

		emban, Yasmin					
17	20 Februari 2023	Djuremi	Tanah Longsor	Gedegan	Tlogomulyo	1	4
18	22 Februari 2023	Dwimono, Rijan	Angin Ribut	Pendowo	Kranggan	2	6
19	23 Februari 2023	Surahman	Tanah Longsor	Gowak	Pringsuratt	1	5
20	27 Februari 2023	Sukatiningsih	Kebakaran	Kupen	Pringsuratt	1	5
21	1 Maret 2023	Widyo, Mujiyono, Ivan, Arif Krisnawan	Angin Ribut	Wadas	Kandang an	8	24
22	1 Maret 2023	Umi Triyaningsih	Angin Ribut	kedu	Kedu	1	2
23	1 Maret 2023	Srimulyo Widodo	Angin Ribut	Wanuten gah	Parakan	1	4
24	2 Maret 2023	Iin Fatimah	Kebakaran	Ngimbrang	Bulu	1	4
25	8 Maret 2023	Rohman	Kebakaran	Parakan Kauman	Parakan	1	5
26	17 Maret 2023	Fafrudin, Siti Azizah	Angin Ribut	Baledu	Kandang an	3	8
27	17 Maret 2023	Wahyu Mustika, Romini	Angin Ribut	Candisari	Tlogomulyo	2	6
28	17 Maret 2023	Mustakim, Isman	Angin Ribut	Langeng	Tlogomulyo	2	6
29	18 Maret 2023	Supardi	Angin Ribut	Pandemulyo	Bulu	1	3
30	18 Maret 2023	Diono	Angin Ribut	Gilingsari	Temanggung	1	3
31	18 Maret 2023	Basori, kabu l, Suryanti	Angin Ribut	Kandang an	Kandang an	3	16
32	28 Maret 2023	Bambang	Tanah Longsor	Pingit	Pringsuratt	1	3
33	28 Maret 2023	Rizky	Angin Ribut	Pare	Kranggan	1	4

34	29 Maret 2023	Rusiyanti	Tanah Longsor	Jambon	Gemawang	2	4
35	30 Maret 2023	Yusak Minanto, Yahya	Angin Ribut	Kedu	Kedu	2	6
36	03 April 2023	Slamet	Tanah Longsor	Dusun Srimuliyo 1/4 Desa Bansari	Bansari	2	8
37	04 April 2023	Raswono	Tanah Longsor	Dusun Tumpang, 1/5 Desa Petarangan	Kledung	1	4
38	10 April 2023	Wahman	Tanah Longsor	Dusun Tegalwatu 3/2 Tegalroso	Parakan	1	3
39	14 April 2023	Surah	Tanah Longsor	Dsn. Putih 2/1 Desa Campuranom	Bansari	1	3
40	23 April 2023	Rohim, Bati, Tumari, Misnaryo, Sri, Saru	Kebakaran	Dusun Balong 1/4 Campurejo	Tretep	6	20
41	10 Mei 2023	Sarjono	Kebakaran	Dusun Mriyan Kulon 1/3 Kundisari	Kedu	1	2
42	12 Mei 2023	Kirwanto	Kebakaran	Menggor 1/4 Kaloran	Kaloran	1	4
43	14 Mei 2023	Kurniyanto	Kebakaran	Kemiri, Kaloran	Kaloran	1	3
44	27 Mei 2023	Ramidi	Kebakaran	Dsn Porot Rt 02 Rw 07 Ds. Getas	Kaloran	1	4

45	1 Juni 2023	Sukardi	Kebakara n	Gintung 1/8 Giripurno	Ngadirejo	1	2
46	8 juni 2023		Kebakara n	Sibajak	Candirot o	1	4
47	15 Juni 2023	Hermawan	Kebakara n	Dusun Bangun Sari 2/7 Bansari	Bansari	1	5
48	16 Juni 2023	Slamet Sumardi	Rumah Roboh	Dusun Gunung Gempol 1/1 Bodren	Jumo	1	4
Jumlah terdampak						99	300

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

16. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35
 Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
 Tahun 2018-2023 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 2.36
 Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Kabupaten
 Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2023

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Sosial dari 15 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 -) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

-) Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial

Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

-) Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, antara lain :

-) Masih terdapat eclusion error dan inclusion error dalam DKD dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan
-) Masih ada penerima bantuan yang belum mempunyai KTP elektronik.
-) Kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS di luar panti merupakan kegiatan respon kasus, dan terdapat kondisi masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan bagi disabilitas, terdapatnya lansia yg tidak dapat dilayani di panti dikarenakan kondisi bedrest, dan kurangnya anggaran untuk operasional Rumsing.
-) Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan Perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan, Koordinasi dengan Dinas instansi terkait, perlu dukungan anggaran untuk bimbingan dan pembinaan lanjut. Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada, dan Koordinasi dengan Disdukcapil terkait percepatan perekamanan KTP elektronik.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut yaitu terdapat penambahan anggaran

pada 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan: yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan dengan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.412.588.758	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.552.588.758	
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					19.412.588.758	A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					19.552.588.758	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.260.576.758		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.400.576.758	
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Temanggun g	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai (100%)			4.286.581.208	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai (100%)			4.286.581.208	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (41 Org)	Orang	4.286.581.208	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (41 Org)	Orang	4.286.581.208	
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggun g	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)			81.666.800	B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggun g	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)			81.666.800	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggun g		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan (20 Paket)	Paket	8.000.000	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Temanggun g		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (20 Paket)	Paket	8.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (12 paket)	Paket	10.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (12 paket)	Paket	10.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (12 Paket)	Paket	5.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (12 Paket)	Paket	5.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (36 Laporan)	Laporan	30.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (36 Laporan)	Laporan	30.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (25 Laporan)	Laporan	28.666.800	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (25 Laporan)	Laporan	28.666.800	
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah (100 %)			782.328.750	C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah (100 %)			782.328.750	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)	Laporan	3.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)	Laporan	3.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	Laporan	75.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	Laporan	75.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 Laporan)	Laporan	5.000.000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4 Laporan)	Laporan	5.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	Laporan	699.328.750	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	Laporan	699.328.750	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya a Pemeliharaan n Barang milik Negara penunjang urusan Pemerintah Daerah (100 %)			110.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (90 Unit)	Unit	100.000.000
2	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (6 Unit)	Unit	10.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL					150.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Negara penunjang urusan Pemerintah Daerah (100 %)			250.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temangg ung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (90 Unit)	Unit	100.000.000	
2	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temangg ung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (6 Unit)	Unit	150.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL					150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat (100%)			10.000.000	A	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat (100%)			10.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (7 Dokumen)	Dokumen	10.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (7 Dokumen)	Dokumen	10.000.000	
B	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan pelatihan PSM dan fasilitasi program program kegiatan PSM, perekrutan anggota PSM (100%)			140.000.000	B	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan pelatihan PSM dan fasilitasi program program kegiatan PSM, perekrutan anggota PSM (100%)			140.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota (30 Org)	Orang	15.000.000	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota (30 Org)	Orang	15.000.000	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota (20 Org)	Orang	20.000.000	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota (20 Org)	Orang	20.000.000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota (20 Keluarga)	keluarga	10.000.000	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota (20 Keluarga)	keluarga	10.000.000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota (6 Lembaga)	Lembaga	85.000.000	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota (6 Lembaga)	Lembaga	85.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Temanggung		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Sertifikat)	Sertifikat	10.000.000	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Temanggung		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Sertifikat)	Sertifikat	10.000.000	
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					30.000.000	III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					30.000.000	
A	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Terfisolitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (100 %)			30.000.000	A	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Terfisolitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (100 %)			30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	Orang	30.000.000	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	Orang	30.000.000	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					950.000.000	III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					950.000.000	
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti			798.000.000	A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (100 %)			798.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Sosial (100 %)			
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (20 org)	Orang	3.000.000
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (130 org)	Orang	25.000.000
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	Orang	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Permakanan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (20 org)	Orang	3.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (130 org)	Orang	25.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (20 org)	Orang	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
				Kabupaten/Kota (20 org)										
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	Orang	3.000.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	Orang	3.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	Orang	5.000.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	Orang	5.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Orang	250.000.000	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Orang	250.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
				Kabupaten/Kota (70 org)							Kabupaten/Kota (70 org)			
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	Orang	3.000.000	7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	Orang	3.000.000	
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	Orang	3.000.000	8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	Orang	3.000.000	
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (80 org)	Orang	450.000.000	9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (80 org)	Orang	450.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	Orang	3.000.000	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	Orang	3.000.000	
11	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	Orang	3.000.000	11	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	Orang	3.000.000	
B	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlayannya Kebutuhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (100 %)			152.000.000	B	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlayannya Kebutuhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (100 %)			152.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (18 Org)	Orang	104.000.000	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (18 Org)	Orang	104.000.000	
2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	Orang	6.000.000	2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	Orang	6.000.000	
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)	Orang	6.000.000	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)	Orang	6.000.000	
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	6.000.000	4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Temanggung		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Orang	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
				Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)		
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	Orang	6.000.000
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	6.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	
				dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)			
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	Orang	6.000.000	
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Orang	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
				Kewenang7an Kabupaten/Kot a (20 Org)							Kabupaten/Kota (20 Org)			
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a (10 Org)	Orang	6.000.000	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	Orang	6.000.000	
8	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a (10 Org)	Orang	6.000.000	8	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	Orang	6.000.000	
9	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kot a (3 Dokumen)	Dokumen	6.000.000	9	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (3 Dokumen)	Dokumen	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					11.052.012.000	IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					11.052.012.000	
A	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasi nya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar (100 %)			1.151.000.000	A	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar (100 %)			1.151.000.000	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggun g		Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	Anak	1.126.000.000	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Temanggun g		Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	Anak	1.126.000.000	
2	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Kab. Temanggun g		Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Anak)	Anak	10.000.000	2	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Kab. Temanggun g		Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Anak)	Anak	10.000.000	
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Temanggun g		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	Anak	15.000.000	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Temanggun g		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	Anak	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terfasilitasi ya Kebutuhan sosial bagi Fakir Miskin Daerah (100 %)			9.901.012.000	B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan sosial bagi Fakir Miskin Daerah (100 %)			9.901.012.000	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (411,885 Orang)	Orang	144.418.950	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (411,885 Orang)	Orang	144.418.950	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (0 Keluarga)	Keluarga	20.000.000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (0 Keluarga)	Keluarga	20.000.000	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (51,830 Keluarga)	Keluarga	7.423.593.050	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggun g		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (51,830 Keluarga)	Keluarga	7.423.593.050	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Temanggung		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (3000 Org)	Orang	2.313.000.000	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Temanggung		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (3000 Org)	Orang	2.313.000.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.770.000.000	V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.770.000.000	
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Alam, Bencana sosial dan Kerentanan sosial (100 %)			1.660.000.000	A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Alam, Bencana sosial dan Kerentanan sosial (100 %)			1.660.000.000	
1	Penyediaan Makanan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (150 org)	Orang	75.000.000	1	Penyediaan Makanan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (150 org)	Orang	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (200 Org)	Orang	75.000.000	2	Penyediaan Sandang	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (200 Org)	Orang	75.000.000	
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (1000 Org)	Orang	1.510.000.000	3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (1000 Org)	Orang	1.510.000.000	
B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pencegahan penanggulangan Bencana (100 %)			110.000.000	B	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pencegahan penanggulangan Bencana (100 %)			110.000.000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Temanggung		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	20.000.000	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Temanggung		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
				Kewenangan Kabupaten/Kota (3 Kampung)							Kewenangan Kabupaten/Kota (3 Kampung)			
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (60 Org)	Orang	90.000.000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (60 Org)	Orang	90.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					200.000.000	VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					200.000.000	
A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terfasilitasi nya Kebutuhan dan Pemeliharaa n Taman Makam Nasional di Daerah Kabupaten/K ota (100 %)			200.000.000	A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan dan Pemeliharaan Taman Makam Nasional di Daerah Kabupaten/Kota (100 %)			200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (2 TMP)	TMP	200.000.000	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Temanggun g		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (2 TMP)	TMP	200.000.000	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tidak ada usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.1
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pengembangan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	TKSK, petugas layanan,	APBD II	Penanganan informasi data dan layanan , pemutakhiran daftar penerima manfaat		Meningkatnya layanan data dan informasi secara terintegrasi	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
2	PUSKE SOS (Pusat Kesejahteraan Sosial)	Petugas layanan		Melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Meningkatnya layanan data dan informasi secara terintegrasi	

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial ada 3Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7.1
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019	Menteri Sosial Republik Indonesia	Nasional	Dinas Sosial

2	Piagam Penghargaan sebagai Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinas Sosial
3	Piagam Penghargaan sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang berhasil mendorong Graduasi	Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial	Nasional	Dinas Sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program

tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian Daerah	ANGKA KEMISKINAN	%	9,30	9,25	9,20
	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	63	63
	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100
	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan social	%	100	100	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	50	60	65
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100

	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100
--	--	--	---	-----	-----	-----

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2024

Diisi tabel pagu indikatis setelah desk

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.552.588.758	A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.858.058.858	8.305.470.100
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19.552.588.758	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.858.058.858	8.305.470.100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.400.576.758	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.462.340.508	61.763.750
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.286.581.208	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.286.581.208	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.286.581.208	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.286.581.208	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.666.800	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.635.000	(31.800)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.997.000	(3.000)
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.666.800	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.638.000	(28.800)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	40.007.000	40.007.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	40.007.000	40.007.000
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.328.750	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.117.400	21.788.650

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.328.750
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	150.000.000
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	85.000.000
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	30.000.000
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.117.400	21.788.650
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.999.900	(100)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.999.900	(100)
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	200.000.000	
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000	
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	50.000.000
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.000	50.000.000
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	30.000.000	
a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000	

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	950.000.000
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	798.000.000
1	Penyediaan Permakanan	3.000.000
2	Penyediaan Sandang	25.000.000
3	Penyediaan Alat Bantu	50.000.000
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	250.000.000
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	450.000.000
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.000.000
11	Pemberian Layanan Rujukan	3.000.000
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	152.000.000

1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000	
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	888.694.000	(61.306.000)
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	875.694.600	77.694.600
1	Penyediaan Permakanan	4.000.000	1.000.000
2	Penyediaan Sandang	25.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	49.997.100	(2.900)
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.999.000	6.999.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.978.000	4.978.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	188.694.000	(61.306.000)
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.995.000	3.995.000
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	2.000.000
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.027.000	12.027.000
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	550.004.500	100.004.500
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000	1.000.000
13	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	7.000.000
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12.999.400	(139.000.600)

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1	Pemberian Layanan Kedaruratan	104.000.000
2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6.000.000
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.000.000
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	6.000.000
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6.000.000
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000
8	Pemberian Layanan Rujukan	6.000.000
9	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6.000.000
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.052.012.000
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.151.000.000
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.126.000.000
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	15.000.000
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.901.012.000
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.418.950
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000

1			(104.000.000)
1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	3.999.700	(2.000.300)
			(6.000.000)
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.999.800	(1.000.200)
			(6.000.000)
			(6.000.000)
			(6.000.000)
			(6.000.000)
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.999.900	(2.000.100)
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	19.307.024.350	8.255.012.350
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.150.999.900	(100)
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.126.000.000	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	9.999.900	(100)
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	15.000.000	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.156.024.450	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.418.950	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.423.593.050
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.313.000.000
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.770.000.000
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.660.000.000
1	Penyediaan Makanan	75.000.000
2	Penyediaan Sandang	75.000.000
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.510.000.000
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.000.000
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.000.000
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000

3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.422.162.500	(1.430.550)
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10.569.443.000	8.256.443.000
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.770.000.000	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.660.000.000	
1	Penyediaan Makanan	75.000.000	
2	Penyediaan Sandang	75.000.000	
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.510.000.000	
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.000.000	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.000.000	
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp. 8.305.470.100,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Pokok Pikiran :Rp. 595.000.000,00.
2. Penanganan Kemiskinan Esktrim :Rp. 6.950.000.000,00 dan Fasilitasi,-
3. Aspirasi Bupati bertambah Rp. 830.000.000,-

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosal Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								27.858.058.858					19.369.651.702
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								27.858.058.858					19.369.651.702
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (100 %)			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (100 %)				5.462.340.508					5.280.879.642
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai (100%)			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai (100%)			4.286.581.208					4.286.581.208

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (41 Org)	41 orang, selama 14 bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (41 Org)	41 orang, selama 14 bulan	Temanggung	4.286.581.208	DAU				4.286.581.208
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)			Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100 %)			86.635.000					93.666.800
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (20 Paket)	20 Paket		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (20 Paket)	20 Paket	Temanggung	8.000.000	DAU				8.000.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Temanggung	5.000.000	DAU				
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (12 paket untuk 12 bulan)	12 paket, 12 bulan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (12 paket untuk 12 bulan)	12 paket, 12 bulan	Temanggung	10.000.000	DAU				15.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (12 Paket, 12 bulan)	12 paket, 12 bulan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (12 Paket, 12 bulan)	12 paket, 12 bulan	Temanggung	5.000.000	DAU				10.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

			Paket, 12 bulan)											
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (36 Laporan)	36 laporan, berupa notulen dan laporan		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (36 Laporan)	36 laporan, berupa notulen dan laporan	Temanggung	29.997.000	DAU				30.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (25 Laporan)	25 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (25 Laporan)	25 Laporan	Temanggung	28.638.000	DAU				30.666.800
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.007.000					
1.06.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Temanggung	40.007.000		Pengadaan CCTV, Back drop Ruang Aula, Mic Werless, Meja Kursi Tamu (Pinjam Rekening sementara)			

1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah (100 %)			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah (100 %)			799.117.400					784.631.634
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)	12 laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)	12 laporan	Temanggung	3.000.000	DAU				6.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	12 laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	12 laporan	Temanggung	75.000.000	DAU				76.350.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	12 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 Laporan)	12 Laporan	Temanggung	721.117.400	DAU				702.281.634
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Negara penunjang urusan Pemerintah Daerah (100 %)			Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Negara penunjang urusan Pemerintah Daerah (100 %)			249.999.900					116.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (90 Unit)	90 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (90 Unit)	90 Unit	Temanggung	100.000.000	DAU				102.000.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (6 Unit)	6 Unit (kantor dingsos, rumah singgah, loka tembarak, loka wanutengah,kanan BLK maron sebagai sekretariat PPDI,)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (6 Unit)	6 Unit (kantor dingsos, rumah singgah, loka tembarak, loka wanutengah,kanan BLK maron sebagai sekretariat PPDI,)	Temanggung	149.999.900	DAU	paling mendesak untuk dilakukan pemeliharaan gedung Dingsos untuk rehab atap satu unit bangunan , kondisi rusak parah di loka wanutengah, sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Internasional cabang Tmg			14.000.000

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial (100%)			Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial (100%)				200.000.000					150.750.000
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat (100%)			Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat (100%)			10.000.000					10.000.000
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (7 Dokumen)	7 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (7 Dokumen)	7 Dokumen	Temanggung	10.000.000	DAU				10.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan pelatihan PSM dan fasilitasi program program kegiatan PSM, perekrutan anggota PSM (100 %)			Pembinaan dan pelatihan PSM dan fasilitasi program program kegiatan PSM, perekrutan anggota PSM (100 %)			190.000.000					140.750.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Org)	30 Org		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Org)	30 Org	Temanggung	15.000.000	DAU				15.750.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)	20 Org		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)	20 Org	Temanggung	20.000.000	DAU				20.000.000
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Keluarga)	20 Keluarga		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Keluarga)	20 Keluarga	Temanggung	10.000.000	DAU				10.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (6 Lembaga)	6 Lembaga		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (6 Lembaga)	6 Lembaga	Temanggung	135.000.000	DAU	pokir 50 jt hibah 60 jt fas 25 jt			85.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Sertifikat)	30 Sertifikat		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Sertifikat)	30 Sertifikat	Temanggung	10.000.000	DAU				10.000.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (100 %)			persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (100 %)				30.000.000					30.150.000

1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Terfisolitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (100 %)			Terfisolitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (100 %)			30.000.000					30.150.000
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	5 org		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	5 org	Temanggung	30.000.000	DAU	selain untuk pemulangan juga digunakan untuk pemberian stimulan bagi migran korban tindak kekerasan sejumlah 5 orang @5.000.000 (penuhan kebutuhan dan modal usaha)			30.150.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (100 %)			Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (100 %)				888.694.000					820.750.000

		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (100 %)			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (100 %)									
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (100 %)			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (100 %)									
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (100 %)			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (100 %)									
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di			Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (100 %)				875.694.600				802.750.000

			Luar Pant Sosial (100 %)											
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (20 org)	20 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (20 org)	20 Orang	Temanggung	4.000.000	DAU	pelayanan diberikan berdasarkan kasus atau bersifat respon kasus, mendukung SPM			3.000.000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (130 org)	250 Orang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (130 org)	250 Orang	Temanggung	25.000.000	DAU				25.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	24 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (20 org)	24 Orang	Temanggung	49.997.100	DAU				50.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

			Kabupaten/Kota (20 org)											
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	2 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	2 Orang	Temanggung	9.999.000	DAU				5.000.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	60 Orang		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (25 org)	60 Orang	Temanggung	9.978.000	DAU				5.000.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (70 org)	80 Orang		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (70 org)	80 Orang	Temanggung	188.694.000	DAU				250.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Temanggung	3.995.000	DAU				
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	35 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	35 Orang	Temanggung	5.000.000	DAU				3.000.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	15 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	15 Orang	Temanggung	15.027.000	DAU				3.000.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	104 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	104 Orang	Temanggung	550.004.500	DAU	respon kasus berdasarkan hasil assessme			450.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

			Kewenangan Kabupaten/Kota (80 org)			Kabupaten/Kota (80 org)				nt dg sasaran 4			
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	6 Orang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (10 org)	6 Orang	Temanggung	4.000.000	DAU			3.000.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	35 Orang		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (15 org)	35 Orang	Temanggung	10.000.000	DAU			5.750.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlayannya Kebutuhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (100 %)			Terlayannya Kebutuhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (100 %)			12.999.400				18.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	10 Org		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (10 Org)	10 Org	Temanggung	3.999.700	DAU				6.000.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)	20 Org		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (20 Org)	20 Org	Temanggung	4.999.800	DAU				6.000.000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (3 Dokumen)	3 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (3 Dokumen)	3 Dokumen	Temanggung	3.999.900	DAU				6.000.000

1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota (100 %)			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota (100 %)				19.307.024.350					11.107.272.060
		persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial(100 %)			persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial(100 %)									
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota (100 %)			persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota (100 %)									
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan (100 %)			persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan (100 %)									
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan			persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan									

		kebutuhan dasar (100 %)			kebutuhan dasar (100 %)									
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar (100 %)			Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar (100 %)			1.150.999.900					1.151.000.000
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	371 Anak Panti		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	371 Anak Panti	Temanggung	1.126.000.000	DAU	dari 11 panti asuhan			1.126.000.000
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Anak)	20 Orang		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (30 Anak)	20 Orang	Temanggung	9.999.900	DAU	fasilitasi untuk kegiatan adopsi			10.000.000
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	250 orang		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (446 Anak)	250 orang	Temanggung	15.000.000	DAU	untuk kegiatan monev dan fasilitasi porseni anak panti setahun sekali dan setiap tahun ada, termasuk			15.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

											mamin dan hadiah			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan sosial bagi Fakir Miskin Daerah (100 %)			Terfasilitasinya Kebutuhan sosial bagi Fakir Miskin Daerah (100 %)			18.156.024.450					9.956.272.060
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (411,885 Orang)	411,885 Orang		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (411,885 Orang)	411,885 Orang	Temanggung	144.418.950	DAU	honor SS, honor supervisor, honor pendata kelurahan			189.679.010
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (0 Keluarga)	80.541 Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (0 Keluarga)	80.541 Keluarga	Temanggung	20.000.000	DAU	untuk biaya operasional bimtek tim pendata desa			20.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (51,830 Keluarga)	44.296 Keluarga		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (51,830 Keluarga)	44.296 Keluarga	Temanggung	7.422.162.500	DBHCHT	BLT DBHCHT dengan sasaran buruh tani tembakau dan buruh pabrik tembakau (BNBA dari desa), 42.040 KPM PKH, 9.790 sasaran DBHCHT,			7.433.593.050

										sisanya untuk fasilitasi PKH,42.040 PKH dan 9.790 DBHCHT				
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (3000 Org)	1900 Org		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (3000 Org)	1900 Org	Temanggung	10.569.443.000	DAU	300 KUBE dengan anggota 10 orang tiap KUBE, satu KUBE 7.500.000 . mulai dari bimtek, fasilitasi pembuatan proposal, pencairan, LPJ, serta pelatihan untuk pendamping PKH dan pelatihan untuk penerima dan Bansos Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Pokir :545 jt,ASBUP			2.313.000.000

											:2,7 M,Kemsek strin :6.950 M dan Fasilitasi			
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota (100 %)			persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota (100 %)				1.770.000.000					1.778.850.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Alam,Bencana sosial dan Kerentanan sosial (100 %)			Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Alam,Bencana sosial dan Kerentanan sosial (100 %)			1.660.000.000					1.660.000.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (150 org)	150 org		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (150 org)	150 org	Temanggung	75.000.000	DAU	bersifat respon kasus, 100 persen terlayani			75.000.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (200 Org)	200 Org		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (200 Org)	200 Org	Temanggung	75.000.000	DAU	bersifat respon kasus, 100 persen terlayani			75.000.000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (1000 Org)	1000 Org		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (1000 Org)	1000 Org	Temanggung	1.510.000.000	DAU	Santunan Kematian @1.500.000			1.510.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pencegahan penanggulangan Bencana (100 %)			Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat pencegahan penanggulangan Bencana (100 %)			110.000.000					118.850.000

RENJA 2024 | DINAS SOSIAL

1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (3 Kampung)	3 Kampung		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (3 Kampung)	3 Kampung	Ds. Karangwuni Pringsurat, Ds. Mranggen Kidul Bansari, Ds. Campurejo Tretep	20.000.000	DAU				20.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (60 Org)	60 Org		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (60 Org)	60 Org	Temanggung	90.000.000	DAU	Honor piket Tagana sebanyak 60 orang @50.500 per piket, penggerakan tagana dg kegiatan tagana ke sekolah, dapur umum, event basecamp, pembersihan bantaran sungai, penanaman pohon			98.850.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase terpeliharanya Taman Makam			persentase terpeliharanya Taman Makam				200.000.000					201.000.000

		Pahlawan (100 %)			Pahlawan (100 %)									
1.06.07.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terfasilitasinya Kebutuhan dan Pemeliharaan Taman Makam Nasional di Daerah Kabupaten/Kota (100 %)			Terfasilitasinya Kebutuhan dan Pemeliharaan Taman Makam Nasional di Daerah Kabupaten/Kota (100 %)				200.000.000				201.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (2 TMP)	2 Lokasi Makam		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (2 TMP)	2 Lokasi Makam	Temanggung		200.000.000	DAU	untuk honor penjaga sebanyak 4 orang penjaga selama 52 minggu dalam setahun perminggu 100.000, selain untuk sarpras dan pemeliharaan, pembangunan bronjong di MP Bambang Sugeng		201.000.000
TOTAL										27.858.058.858				19.369.651.702

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,22%, realisasi Belanja Modal sebesar 98,14 %, realisasi belanja Sebesar 95,35 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 14,35 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0,01 %, realisasi belanja Rp. 4.962.780.639,00 sebesar 14,36.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 27.858.058.858,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dapat tercapai sesuai dengan

pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013